

# PANDANGAN ISLAM MENGENAI NEGARA (Ditinjau dari Pandangan Ibnu Khaldun)

Fathoni

IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo

*email: fathoni@gmail.com*

## Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Ibnu Khaldun tentang negara. negara yang digambarkan menurut Ibn Khaldun memiliki kesinambungan antara masyarakat manusia dan kekuatan negara dalam menangkal ancaman yang datang. Meskipun Ibnu Khaldun tidak mendefinisikan negara secara jelas tetapi kita dapat melihat ciri-ciri negara digambarkan sebagai pemimpin, berwawasan dan berwibawa untuk dapat mengatur masyarakat manusia di dalam negeri. Hasil dalam penelitian ini bahwa negara membutuhkan undang-undang yang mengatur tentang solidaritas kelompok agar dapat tertib dan tertib serta negara atau kekuasaan merupakan instrumen yang diperlukan dan menjadi kebutuhan di sejumlah masyarakat manusia. Namun agama dalam suatu negara bukanlah suatu masalah yang harus dibicarakan karena dengan perkembangan dan peradaban yang ada maka agama bukanlah suatu hal yang relevan dengan negara tersebut.

**Kata kunci:** negara, agama, kepemimpinan, solidaritas kelompok

## Abstract

*This study aims to explain Ibn Khaldun's view of the state. the country described according to Ibn Khaldun had a continuity between human society and the power of the state in counteracting the coming threat. although Ibn Khaldun did not clearly define the country but we can see the characteristics of the state described as having a leader, having knowledge and being authoritative to be able to regulate human society within the country. the results in this study that the state requires a law governing group solidarity so that it can be orderly and orderly and a state or power is a necessary instrument and becomes a necessity in a number of human societies. but religion in a country is not an issue that must be discussed because with the development and existing civilization that religion is not a matter that is relevant to the country.*

**Keywords:** state, religion, leadership, group solidarity

## **PENDAHULUAN**

Pemahaman dan pemikiran mengenai suatu hal menurut para tokoh dan ahli bukanlah permasalahan yang baru jika dikaji dan dibahas kembali. Pemahaman dan pemikiran tersebut akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Dengan perkembangan zaman saat ini pemahaman dan pemikiran menurut para ahli menjadi penting, mengingat pemahaman dan pemikiran tersebut telah diperbincangkan pada saat itu. Pembahasan dan pengkajian kembali mengenai suatu hal menjadi penting dalam melihat pemahaman dan pemikiran pada saat itu dengan yang terjadi pada saat ini. Salah satu hal yang menjadi penting dalam kehidupan dan interaksi antar manusia didunia adalah negara.<sup>1</sup> Negara menjadi perwujudan mengenai masa lalu yang berkaitan dengan kolektivitas sosial manusia dalam sebuah negara.<sup>2</sup> Kolektivitas sosial ini dapat dilihat sampai saat ini sehingga kita dapat melihat perwujudan masa lalu dengan melihat perkembangan sosial yang terjadi saat ini.

Salah satu pemahaman dan pemikiran mengenai negara yang relevan dengan saat ini yakni menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan sekaligus filsuf sejarah.<sup>3</sup> Ibnu Khaldun memiliki pemahaman dan pemikiran yang dianggap diluar dugaan untuk manusia yang hidup pada masanya terutama mengenai sejarah sehingga pemahaman dan pemikirannya

---

<sup>1</sup> Adil H Mouhammed. (2016). "On Ibn Khaldun's Contribution to Heterodox Political Economy." *Journal History of Economic Review*, Vol. 46, No. 1, 89-105, doi : <https://doi.org/10.1080/18386318.2007.11682111>

<sup>2</sup> Boulakia, Jean David C. (1971). "Ibnu Khaldun: A Fourteenth-Century Economist." in *Journal of Political Economy*, Vol. 79, No. 5. Chicago: The University of Chicago Press

<sup>3</sup> Aytikin, Demircioglu. (2014). "The Effects of Shortage and Abundance on Human Being in Ibn Khaldun Idealism." *Journal studies on Ethno-Medicine*, Vol. 8, No. 1, 1-6, doi : <https://doi.org/10.1080/09735070.2014.11886466>

dapat dipelajari dan dipahami hingga saat ini. Ibnu Khaldun tidak hanya seorang filsuf sejarah yang telah mempelajari permasalahan dan pandangan yang ada pada saat itu. Tetapi Ibnu Khaldun berani untuk dapat berpendapat dan mengeluarkan pemahaman dan pikirannya yang dianggap baru sehingga apa yang ia pikirkan pada saat itu menjadi suatu yang relevan dengan keadaan saat ini.<sup>4</sup>

Pemahaman dan pemikiran Ibnu Khaldun ini bukan semata-mata dipikirkan secara tiba-tiba. Tetapi hal ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya yang ia miliki. Diketahui bahwa Ibnu Khaldun memiliki kehidupan yang berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lainnya sehingga hal ini menjadikan Ibnu Khaldun memiliki pandangan dan paradigma baru dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>5</sup> Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial memerlukan sebuah tempat untuk dapat bertahan hidup dan mengembangkan dirinya sebagai makhluk sosial. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa manusia perlu sebuah negara untuk dapat menjamin bertahan hidup dengan berdampingan untuk dapat mempertahankan kehidupannya.<sup>6</sup> Dengan demikian, hidup secara berdampingan manusia akan saling bertahan hidup satu sama lain sehingga manusia dapat menjamin kehidupannya. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan manusia antara satu dengan yang lainnya sehingga manusia akan saling memerlukan bantuan manusia lainnya dalam kehidupan bersosial.

---

<sup>4</sup> Kamali, Mohammad Hashim. (2016). Caliphate and Political Jurisprudence in Islam: Historical and Contemporary Perspectives.' *Muslim World Journal*, Vol. 106, No. 2, 374–383.

<sup>5</sup> Arnold J. Toynbee. "A Study of History" dalam Charles Issawi. (1962). *Filsafat Islam Tentang Sejarah: Pilihan dari Muqaddimah Karangan Ibnu Khaldun dari Tunis (1332 – 1406)*. Jakarta: Tintamas

<sup>6</sup> Khaldun, Ibn. (1986). *Muqaddimah Ibn Khaldun, Terj. Ahmadie Thaha*. Jakarta: Pustaka Firdaus

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan untuk dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi. Studi kepustakaan digunakan sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan dokumentasi dan data-data yang relevan dengan hasil penelitian. Penelitian ini turut menjelaskan dan menganalisis permasalahan sehingga akan ditemukan hasil akhir dan kajian yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik sehingga turut menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang terjadi didalam kontek tema yang diangkat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan bertujuan untuk menjelaskan secara rinci pandangan islam dengan negara yang ditinjau dari Ibu Khaldun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Solidaritas Kelompok Menjadi Awal Mula**

Sebelum terbentuknya sebuah negara, terdapat masyarakat yang hidup saling berdampingan saling memiliki hubungan dan interaksi satu sama lain. Setiap komunitas yang ada memiliki solidaritas. Solidaritas ini muncul dan tumbuh atas kebiasaan yang mereka lakukan. Dalam suatu komunitas atau kelompok pasti memiliki pemimpin dalam kelompoknya. Kepemimpinan ini dilakukan untuk dapat melaksanakan kekuasaan sehingga seorang pemimpin tersebut dapat mengatur solidaritas kelompok tersebut.<sup>7</sup> Menurut Ibnu Khaldun (1958), bahwa kuat atau lemahnya suatu negara bergantung terhadap solidaritas kelompok dan

---

<sup>7</sup> Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. (2014). *Mukaddimah*, ter. (Masturi Irham dkk). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

kepemimpinan seorang dalam kelompok tersebut.<sup>8</sup> Semakin tinggi solidaritas dalam kelompok maka akan berpengaruh terhadap kuatnya negara tersebut, tetapi sebaliknya jika rendahnya solidaritas kelompok maka negara tersebut akan mengalami kehancuran sehingga pentingnya solidaritas kelompok dan kepemimpinan dalam kelompok tersebut.

Munawir Sjadzali (1991) melihat pandangan Ibnu Khaldun mengenai negara memiliki hubungan dengan solidaritas kelompok. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan berikut<sup>9</sup> :

- 1) Solidaritas kelompok menjadi salah satu kewajiban yang dimiliki oleh suatu negara. Karena berhubungan dengan berdirinya negara yang kuat.
- 2) Kepemimpinan dalam negara dapat mengatur masyarakatnya untuk dapat melindungi dari ancaman yang ada.
- 3) Negara akan bertahan dalam solidaritas kelompok jika diikuti dengan agama.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa solidaritas kelompok memiliki pengaruh dan peran penting dalam membentuk sebuah negara. Dengan solidaritas kelompok akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya sehingga memungkinkan negara akan tumbuh berkembang dan maju sesuai dengan solidaritas kelompoknya. Peran dalam kepemimpinan juga memiliki pengaruh terhadap keadaan suatu negara. Hal ini karena peran pemimpin menjadi salah satu objek utama dan penggerak dalam menentukan kebijakan dan keputusan yang diambil sehingga akan berpengaruh terhadap solidaritas kelompok tersebut. Penelitian ini akan memperkenalkan dan menjelaskan

---

<sup>8</sup> Ibnu Khaldun. (1958). *The Muqadimah*, (Franz Rosenthal), New York: Patheon Books.

<sup>9</sup> Munawir Sjadzali, (1991). *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press

pemikiran dan pandangan Ibnu Khaldun mengenai negara terutama teori mengenai suatu bangsa dan peradaban kemudian merefleksikan pandangan tersebut kedalam kehidupan sehari-hari.

## **PANDANGAN IBNU KHANDUN MENGENAI NEGARA**

Ibnu Khaldun memiliki konsep tersendiri mengenai negara. Ibnu Khaldun (1967) menekankan adanya kekuatan atau *power* dalam suatu negara sehingga peran masyarakat dan negara memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya.<sup>10</sup> Negara tidak mungkin terlepas dari masyarakat dan masyarakat tidak akan lepas dari adanya suatu negara.<sup>11</sup> Ibnu Khaldun cenderung memiliki perbedaan pandangan dengan para ahli filsuf lainnya mengenai negara. Ibnu Khaldun melihat suatu negara di Eropa bahwa masyarakat menyatakan kesetiaannya kepada para pemimpinnya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara seperti itu memiliki kerentanan moral bagi masyarakatnya.<sup>12</sup> Sebenarnya masyarakat hanya berkewajiban memberikan kesetiaan kepada negara bukan para pemimpinnya dalam menjalankan syariat agama.

Menurut Ibnu Khaldun (1967) negara seperti makhluk hidup yang lahir, menjadi tua dan akan hancur sehingga negara harus berkembang untuk melangsungkan kehidupannya.<sup>13</sup> Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara memiliki umur sampai tiga generasi atau sekitar 120 tahun. Generasi ini dapat dilihat sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Ibn Khaldun. A. (1967), *The Muqaddimah*, (F. Rosenthal, Trans., N. J. Dawood, Ed.), London: Bollinger Series, Princeton University Press

<sup>11</sup> Lambton, Ann K. S. (1981). *State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: The Jurists*. London and New York: Routledge

<sup>12</sup> *Op. Cit.*, Khaldun, 1967.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Ibn Khaldun, 1967.

---

- 1) Generasi pertama, negara masuk kedalam kondisi yang primitif dan jauh dari penggunaan teknologi dan kehidupan kota. Generasi ini cenderung hidup dan tinggal di pedesaan.
- 2) Generasi kedua, negara akan masuk kedalam kategori memiliki pengaruh dan kekuasaan sehingga kehidupan sebelumnya yakni kehidupan dengan kondisi primitif akan ditinggalkan dengan berganti kepada kehidupan kota.
- 3) Generasi ketiga, negara akan masuk kedalam kehancuran. Generasi ini akan mengalami ketakutan, akan kehilangan berbagai otoritas sehingga akan mengalami kehancuran secara perlahan.

Perkembangan negara dapat dilihat dari sejarah pendirian negara tersebut. Terdapat 5 (lima) proses perkembangan negara mulai dari munculnya negara hingga hancurnya negara tersebut.<sup>14</sup> Berikut ini merupakan 5 (lima) proses tersebut, di antaranya :

- 1) Pembentukan negara

Dalam mencapai tujuannya negara akan menghadapi berbagai tantangan dan akan menguasai kekuasaan yang ada. Negara terbentuk berdasarkan solidaritas kelompok sehingga dengan menyatukan, menyamakan prinsip dan tujuan, dan mempertahankan diri menjadi proses awal terbentuknya sebuah negara. Negara harus mampu melewati tantangan tersebut untuk dapat membentuk suatu negara. Solidaritas kelompok menjadi penentu keberhasilan negara dalam menjalankan dan membentuk suatu negara.

- 2) Pemusatan kekuasaan

---

<sup>14</sup> Khaldûn, I. (2015). *The Muqaddimah: An Introduction to History - Abridged Edition* (B. B. Lawrence, Ed.). New York: Princeton University Press.

Pemusatan kekuasaan menjadi salah satu hal yang dialami oleh negara dalam awal pembentukan negara sehingga negara harus memegang kuat prinsipnya agar dapat terhindar dari monopoli kekuasaan dan lain-lain.

3) Puncak perkembangan.

Dalam proses ini negara akan mengalami perkembangan yang drastis dalam berbagai bidang dan menjadi puncak perkembangan bagi negara sehingga negara akan diberikan berbagai kecanggihan teknologi, kemegahan dan lain-lain yang menuntut negara dalam mendapatkan hal tersebut.

4) Penurunan produktivitas

Negara akan mengalami dimana terdapat situasi dan kondisi yang dinamis dan cenderung terjadinya penurunan produktivitas dan menentukan negara dalam perkembangannya.

5) Akhir negara

Negara masuk kedalam masa-masa akhir dan kehancuran. Negara tidak akan terhindar dari kehancuran yang terjadi sehingga negara hanya menunggu waktu untuk dapat berakhir.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Ibnu Khaldun memandang negara memiliki pengaruh atas perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial yang terjadi akan mempengaruhi solidaritas kelompok dan akan berpengaruh terhadap negara. Hal ini termasuk dalam kehancuran negara akan berkaitan dengan perubahan sosial. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan sosial yang terjadi karena sejarah memiliki pengaruh untuk dapat memahami perubahan social dan perubahan sosial dalam



agama, keluarga, pemerintahan, dan ekonomi dapat berpengaruh terhadap suatu negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adil H Mouhammed. (2016). "On Ibn Khaldun's Contribution tp Heterodox Political Economy." *Journal History of Economic Review*, Vol. 46, No. 1, 89-105, doi : <https://doi.org/10.1080/18386318.2007.11682111>
- Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. (2014). *Mukaddimah*, ter. (Masturi Irham dkk). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Arnold J. Toynbee. "A Study of History" dalam Charles Issawi. (1962). *Filsafat Islam Tentang Sejarah: Pilihan dari Muqaddimah Karangan Ibnu Khaldun dari Tunis (1332 – 1406)*. Jakarta: Tintamas
- Aytekin, Demircioglu. (2014). "The Effects of Shortage and Abundance on Human Being in Ibn Khaldun Idealism." *Journal tudies on Ethno-Medicine*, Vol. 8, No. 1, 1-6, doi : <https://doi.org/10.1080/09735070.2014.11886466>
- Boulakia, Jean David C. (1971). "Ibnu Khaldun: A Fourteenth-Century Economist." in *Journal of Political Economy*, Vol. 79. No. 5. Chicago: The University of Chicago Press
- Ibn Khaldun. A. (1967), *The Muqaddimah*, (F. Rosenthal, Trans., N. J. Dawood, Ed.), London: Bollinger Series, Princeton University Press
- Ibnu Khaldun. (1958). *The Muqadimah*, (Franz Rosenthal), New York: Patheon Books.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2016). Caliphate and Political Jurisprudence in Islam: Historical and Contemporary Perspectives.' *Muslim World Journal*, Vol. 106, No. 2, 374–383.
- Khaldûn, I. (2015). *The Muqaddimah: An Introduction to History - Abridged Edition* (B. B. Lawrence, Ed.). New York: Princeton University Press.
-

Khaldun, Ibn. (1986). *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terj. Ahmadie Thaha.

Jakarta: Pustaka Firdaus

Lambton, Ann K. S. (1981). *State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: The Jurists*. London

and New York: Routledge

Munawir Sjadzali, (1991). *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press